

KEMISKINAN DAN POLA KONSUMSI PENDUDUK KABUPATEN MAGELANG 2016



**KEMISKINAN DAN
POLA KONSUMSI PENDUDUK
KABUPATEN MAGELANG
2016**



Kemiskinan dan Pola Konsumsi Penduduk Kabupaten Magelang 2016

ISSN/ISBN : -
Nomor Publikasi : 33080.1730
Katalog : 3205005.3308

Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman : viii + 50

Naskah

BPS Kabupaten Magelang

Cover

BPS Kabupaten Magelang

Diterbitkan oleh

© BPS Kabupaten Magelang

Dicetak oleh

TM Percetakan dan Advertising (Cetakan I: November 2017)

Percetakan Daerah Aneka Usaha (Cetakan II: November 2017)

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

KATA PENGANTAR

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang mendapat perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat, baik secara nasional maupun regional. Setiap tahun perkembangan penduduk miskin dan komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan menjadi pokok bahasan dalam evaluasi dan perencanaan pembangunan. Untuk kegiatan tersebut, aspek penting yang dibutuhkan untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Badan Pusat Statistik setiap tahunnya berusaha menyajikan data dan informasi kemiskinan berdasarkan survei. Selain itu, dibahas pula tentang pola konsumsi penduduk menurut jenis konsumsinya sehingga dapat membantu memberi gambaran tentang pemerataan pendapatan dan pola konsumsi penduduk.

Publikasi Kemiskinan dan Pola Konsumsi Penduduk Kabupaten Magelang 2016 menjawab kebutuhan pemerintah daerah akan kebutuhan data yang dapat digunakan sebagai bahan untuk penentuan kebijakan. Publikasi ini merupakan hasil dari pengolahan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan setiap tahun.

Diharapkan publikasi ini dapat memberikan informasi yang memadai bagi semua pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Semoga publikasi ini bermanfaat

Magelang, Oktober 2017
Kepala Badan Pusat statistik
Kabupaten Magelang



Ir. SRI WIYADI, MM

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	V
Daftar Gambar	vi
1 Pendahuluan	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Tujuan	3
1.3 Sistematika Penyajian	4
2 Metodologi	6
2.1 Sumber Data	6
2.2 Konsep dan Definisi Secara Umum	6
2.3 Konsep dan Definisi Kemiskinan	7
2.4 Penyebab Kemiskinan	8
2.5 Pengukuran Kemiskinan	9
2.5.1 Penghitungan Garis Kemiskinan (GK)	9
2.5.2 Indikator Kemiskinan Konsumsi	14
2.5 Desain Pengukuran	14
2.6 Kalori	16
3 Analisis Kemiskinan	18
3.1 Kondisi Kemiskinan	18
3.1.1 Kemiskinan Kabupaten Magelang Tahun 2007-2016	18
3.1.2 Garis Kemiskinan (GK) Tahun 2007-2016	20
3.1.3 Tingkat Kedalaman Kemiskinan dan Tingkat Keparahan Kemiskinan Tahun 2007-2016	22
3.2 Karakteristik Penduduk Miskin	25
3.2.1 Pendidikan	25
3.2.2 Ketenagakerjaan	28

	Halaman
3.2.3 Kesehatan	30
3.2.4 Fasilitas Perumahan	32
3.3 Program Penanggulangan Kemiskinan	33
4 Pola Konsumsi Penduduk	40
4.1 Gambaran Umum Ekonomi Kabupaten Magelang	40
4.2 Rata-rata Pengeluaran Penduduk	41
4.3 Pola Konsumsi Penduduk	43
4.3.1 Pola Konsumsi Makanan	33
4.3.2 Pola Konsumsi Non Makanan	35
5 Penutup	49

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 3.1.1.	Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2016	20
Tabel 3.1.2.	Garis Kemiskinan Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2016	21
Tabel 3.1.3.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan (<i>Poverty Gap Index</i> , P_1) serta Tingkat Keparahan Kemiskinan (<i>Poverty Severity Index</i> , P_2) Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 – 2016	23
Tabel 3.3.1.	Persentase Rumah Tangga Miskin Penerima Raskin, Rata-rata Banyaknya Raskin yang Diterima dan Rata-rata Harga Raskin Perkg Tahun 2015-2016	34
Tabel 3.3.2.	Persentase Penduduk Miskin Menurut Jaminan Kesehatan yang Dimiliki Tahun 2015-2016	35
Tabel 3.3.3.	Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Kredit Usaha yang Diterima Setahun Terakhir Tahun 2015-2016	36
Tabel 3.3.4.	Persentase Penduduk Miskin yang Bersekolah dan Mendapatkan Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tahun 2015-2016 ...	37
Tabel 4.1.	Persentase Penduduk dan Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2016	41
Tabel 4.2.1.	Pola Konsumsi Makanan dan Non Makanan Penduduk, Tahun 2016	45

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Magelang dan Jawa Tengah Tahun 2007-2016	19
Gambar 3.1.2. Garis Kemiskinan Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2016	22
Gambar 3.1.3. Tingkat Kedalaman Kemiskinan (<i>Poverty Gap Index</i> , P_1) dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (<i>Poverty Severity Index</i> , P_2) Kabupaten Magelang Tahun 2007 – 2016	24
Gambar 3.2.1.1 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2015-2016	26
Gambar 3.2.1.2. Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Miskin Umur 15 – 24 Tahun dan 15 – 55 Tahun Tahun 2015-2016	27
Gambar 3.2.1.3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Miskin Umur 7-15 Tahun 2015-2016	28
Gambar 3.2.2.1. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke atas menurut Sektor Pekerjaan Tahun 2015-2016	29
Gambar 3.2.2.2. Persentase Penduduk Miskin Umur 15 Tahun Ke atas menurut Status Pekerjaan Tahun 2015-2016	30
Gambar 3.2.3.1. Pemberian Imunisasi Balita Miskin Berdasarkan Jenis Imunisasi Tahun 2015-2016	31
Gambar 3.2.3.2. Persentase Perempuan Miskin Umur 15-49 Tahun yang Mengikuti Program KB dan Persentase Balita Miskin yang Mendapatkan Imunisasi Tahun 2015-2016	32
Gambar 3.2.4 Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Bersih Layak Konsumsi dan yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama Tahun 2015-2016	33
Gambar 3.3.1. Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Tahun 2015-2016	38
Gambar 4.3.1. Komposisi Konsumsi Penduduk Kabupaten Magelang, Tahun 2011-2016	42
Gambar 4.3.2. Komposisi Konsumsi Penduduk Berdasarkan Kelompok Pengeluaran , Tahun 2016	44

	Halaman
Gambar 4.3.3. Pola Konsumsi Makanan Menurut Penggunaan , Tahun 2016	46
Gambar 4.3.4. Pola Konsumsi Non Makanan Menurut Penggunaan, Tahun 2016	47



BAB 1

PENDUDUK

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah kemiskinan menjadi perhatian serius bagi pemerintah dari tahun ke tahun. Keberhasilan penyelenggaraan suatu pemerintahan salah satunya juga dilihat dari tingkat kemiskinan suatu daerah dan kemampuan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan yang terjadi. Berkaitan dengan hal tersebut, Strategi penanggulangan kemiskinan dan evaluasi kondisi kemiskinan selalu menjadi prioritas bagi pemerintah. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Data kemiskinan yang baik harus merupakan data kemiskinan yang dapat dipercaya, sehingga bisa digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, bisa digunakan untuk membandingkan kondisi kemiskinan antar waktu dan antar daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Badan Pusat Statistik pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu angka kemiskinan baru dihitung secara nasional. Kemudian mulai Tahun 1990, informasi mengenai penduduk miskin mulai disajikan sampai tingkat provinsi meskipun beberapa provinsi masih digabung. Baru pada Tahun 2002, BPS menyajikan data dan informasi kemiskinan sampai tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan data Susenas. Pada awalnya data kemiskinan dihitung 3 tahun sekali sesuai dengan pelaksanaan Susenas Modul konsumsi yang dilakukan setiap 3 tahun, mulai tahun 2011 sampai 2014 dilakukan penghitungan kemiskinan setiap tahun dengan pelaksanaan Susenas Modul Konsumsi triwulanan. Sejak tahun 2015 penghitungan angka kemiskinan didasarkan pada hasil Susenas Konsumsi Pengeluaran yang dilakukan setiap bulan Maret.

Arah dan tujuan pembangunan nasional mensyaratkan bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, dan hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati merata oleh seluruh rakyat berdasarkan dengan nilai kontribusi masing-masing. Pembangunan tidak hanya bertujuan

untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pengentasan kemiskinan, namun harus diikuti dengan aspek pemerataan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan kelompok penghasilan tinggi dan penghasilan rendah. Berkaitan dengan hal ini, diperlukan tersedianya data dan informasi yang dapat memberi gambaran tentang kondisi kesejahteraan dan pola konsumsi penduduk-

Berkaitan dengan hal-hal diatas dan untuk menjawab kebutuhan data perlu disusun publikasi “Kemiskinan dan Pola Konsumsi Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2016” yang memuat data dan informasi tentang kondisi kemiskinan dan pola konsumsi penduduk Kabupaten Magelang.

1.2. Tujuan

Secara spesifik penerbitan publikasi “Kemiskinan dan Pola Konsumsi Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2016” ini bertujuan memberikan data dan informasi tentang:

- i. perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten Magelang tahun 2007-2016
- ii. perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Magelang tahun 2007-2016
- iii. perkembangan Tingkat Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Magelang tahun 2007-2016.
- iv. karakteristik penduduk miskin di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2016
- v. program pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan Tahun 2015-2016
- vi. gambaran secara umum kondisi dan pola pengeluaran konsumsi penduduk Kabupaten Magelang pada tahun 2016.
- vii. gambaran dan bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengevaluasi dan merencanakan pembangunan berkaitan dengan kemiskinan dan pola konsumsi penduduknya.

1.3. Sistematika Penyajian

Publikasi ini disajikan secara sistematis dalam 5 (lima) bab sebagai berikut:

Bab satu membicarakan masalah pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan, lingkup pembahasan, sumber data dan sistematika penyajian.

Bab dua membicarakan masalah metodologi yang berisi sumber data, konsep dan definisi, penghitungan kemiskinan dan teori yang dipakai dalam analisis kemiskinan.

Bab tiga membicarakan masalah analisis kemiskinan yang berisi berbagai ukuran kemiskinan, karakteristik penduduk miskin, dan program bantuan pengentasan kemiskinan.

Bab empat analisis pola konsumsi penduduk di Kabupaten Magelang.

Bab lima menyajikan masalah saran kebijakan yang berisi pentingnya data kemiskinan, strategi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan dan pengaruh pola konsumsi penduduk.

A large, stylized graphic element consisting of a white, rounded, organic shape with a teal border, set against a background of a blue sky with clouds. The shape is positioned in the center of the page, with its top-left corner cut off by the teal border.

BAB 2

METODOLOGI

BAB 2

METODOLOGI

2.1. Sumber Data

Angka Kemiskinan dan Pola Konsumsi penduduk Tahun 2016 di Kabupaten Magelang dihitung berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2016. Pengumpulan data rumah tangga diperoleh dari hasil wawancara langsung antara pencacah dan responden yang mewakili rumah tangga bersangkutan

2.2. Konsep dan Definisi Secara Umum

Konsep dan definisi yang digunakan dalam penulisan publikasi ini sesuai dengan konsep dan definisi yang digunakan pada Susenas 2016.

Rumah Tangga

Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta kebutuhan sehari-hari diurus bersama menjadi satu.

Anggota rumah tangga/ Penduduk

Anggota Rumah Tangga (ART) / penduduk adalah orang yang biasanya tinggal dalam satu rumah tangga, baik yang berada didalam rumah tangga saat pencacahan maupun yang sementara sedang tidak ada. Orang yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan untuk menetap ditempat lain/pindah tidak termasuk ART. Dan orang yang telah tinggal di rumah tangga enam bulan atau lebih atau kurang dari 6 bulan tapi bertujuan untuk menetap dianggap sebagai ART.

Pengeluaran

Pengeluaran rumah tangga sebulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu konsumsi makanan dan konsumsi non makanan (perumahan, aneka barang dan jasa, pendidikan, kesehatan, transportasi, pakaian, barang tahan lama, pajak dan asuransi, dan keperluan pesta dan upacara). Konsumsi yang dimasukkan disini tidak

memperhatikan asal barang atau jasa, jadi baik dari pembelian, pemberian, dan produksi sendiri yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga semua dimasukkan dalam pencacahan. Sedangkan pengeluaran rumah tangga yang digunakan rumah tangga lain atau diberikan kepada pihak lain tidak dimasukkan dalam pencacahan konsumsi rumah tangga.

Pendapatan

Pendapatan adalah penerimaan berupa uang maupun barang yang diterima atau dihasilkan. Dalam kenyataan dilapangan, informasi tentang pendapatan tidak seperti yang diharapkan karena banyak responden cenderung menyembunyikan infoemasi pendapatan yang sebenarnya. Oleh sebab itu, data pendapatan diperkirakan dari data pengeluaran dengan asumsi bahwa pengeluaran masyarakat merupakan gambaran dari pendapatan mereka.

2.3. Konsep dan Definisi Kemiskinan

Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. BAPPENAS (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Untuk mewujudkan hak-hak dasar seseorang atau sekelompok orang miskin Bappenas menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain;

1. Pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi.
2. Pendekatan pendapatan (*income approach*), kemiskinan disebabkan oleh

rendahnya penguasaan asset, dan alat- alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat. Pendekatan ini, menentukan secara rigid standar pendapatan seseorang di dalam masyarakat untuk membedakan kelas sosialnya.

3. Pendekatan kemampuan dasar (*human capability approach*), menilai kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat. Keterbatasan kemampuan ini menyebabkan tertutupnya kemungkinan bagi orang miskin terlibat dalam pengambilan keputusan.
4. Pendekatan objective and subjective, pendekatan obyektif atau sering juga disebut sebagai pendekatan kesejahteraan (*the welfare approach*) menekankan pada penilaian normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan, sedangkan pendekatan subyektif menilai kemiskinan berdasarkan pendapat atau pandangan orang miskin sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa kemiskinan tidak bisa didefinisikan dengan sangat sederhana, karena tidak hanya berhubungan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan material, tetapi juga sangat berkaitan dengan dimensi kehidupan manusia yang lain. Karenanya, kemiskinan hanya dapat ditanggulangi apabila dimensi–dimensi lain itu diperhitungkan.

2.4. Penyebab Kemiskinan

Indikator utama kemiskinan menurut Bank Dunia adalah kepemilikan tanah dan modal yang terbatas, terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, pembangunan yang bias kota, perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat, perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi, rendahnya produktivitas, budaya hidup yang jelek, tata pemerintahan yang buruk, dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan. Menurut Bank Dunia (2003), penyebab dasar kemiskinan adalah:

1. kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal;
2. terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana;
3. kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor;
4. adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung;

5. adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern);
6. rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat;
7. budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya;
8. tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*);
9. pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

2.5. Pengukuran Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, digunakan pendekatan kebutuhan dasar atau dengan kata lain, konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Bank Dunia menggunakan dua kriteria dalam menentukan garis kemiskinan:

1. Menggunakan garis kemiskinan nasional yang didasarkan pada pola konsumsi 2 100 Kalori per hari.
2. Garis kemiskinan internasional berdasarkan PPP (*purchasing power parity*) 1,25 dolar AS dan 2 dolar AS, sehingga dapat digunakan sebagai standar internasional yang bisa diterapkan di seluruh negara. Nilai tukar PPP 1 dolar AS mempunyai pengertian berapa rupiah yang diperlukan untuk membeli barang dan jasa, yang bisa dibeli dengan satu dolar atau dua dolar di Amerika Serikat. Nilai tukar ini dihitung secara berkala dari data harga dan kuantitas konsumsi sejumlah barang dan jasa untuk setiap negara.

Garis kemiskinan nasional yang dikeluarkan BPS yang berdasarkan pola konsumsi digunakan Bank Dunia untuk menganalisis profil kemiskinan, penyebab kemiskinan dan telaah strategi atau program antikeiskinan di sebuah negara.

2.5.1 Penghitungan Garis Kemiskinan (GK)

BPS dalam mengukur kemiskinan menggunakan pendekatan pengeluaran, dimana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor dan Konsumsi. Garis Kemiskinan (GK) merupakan

penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Rumus Penghitungan :

$$GK = GKM + GKNM$$

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan

Teknik penghitungan GKM:

1. Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (*reference populaion*) yaitu 20 persen penduduk yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasar GK periode sebelumnya yang di-*inflate* dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
2. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata Kalori dari ke-52 komoditi tersebut.

3. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah :

$$GKM_j = \sum_{k=1}^{52} P_{jk} \cdot Q_{jk} = \sum_{k=1}^{52} V_{jk}$$

Dimana :

GKM_j = Garis Kemiskinan Makanan Daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori).

P_{jk} = Harga komoditi k di daerah j.

Q_{jk} = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j.

V_{jk} = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j.

j = Daerah (perkotaan atau pedesaan)

Selanjutnya GKM_j tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata Kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga :

$$\overline{HK}_j = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jk}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jk}}$$

dimana :

K_{jk} = Kalori dari komoditi k di daerah j

\overline{HK}_j = Harga rata-rata Kalori di daerah j

$$F_j = \overline{HK}_j \times 2100$$

dimana :

F_j = Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara

dengan 2100 kilokalori/kapita/hari atau GKM.

J = daerah (perkotaan/perdesaan).

4. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di pedesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di pedesaan.

Nilai kebutuhan minimum perkomoditi /sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKP), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi.

Nilai kebutuhan minimum non makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$NF_p = \sum_{i=1}^n r_i \times V_i$$

dimana:

NF_p = Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non makanan daerah p (GKNM_p).

V_i = Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah p (dari Susenas modul konsumsi).

r_i = Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan menurut daerah (hasil SPPKD2004).

I = Jenis komoditi non-makanan terpilih di daerah p.

P = Daerah (perkotaan atau pedesaan).

Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan

sebagai penduduk miskin (PM). Persentase penduduk miskin di suatu provinsi dihitung dengan:

$$\%PM_p = \frac{PM_p}{P_p} \cdot 100$$

$\%PM_p$ = % Penduduk miskin di provinsi p.

PM_p = Jumlah penduduk miskin di provinsi p.

P_p = Jumlah penduduk di provinsi p.

Sementara itu, penduduk miskin untuk level nasional merupakan jumlah dari penduduk miskin provinsi atau:

$$PM_I = \sum_{p=1}^n PM_p$$

PM_I = Penduduk miskin Indonesia.

PM_p = Penduduk miskin provinsi p.

N = Jumlah provinsi.

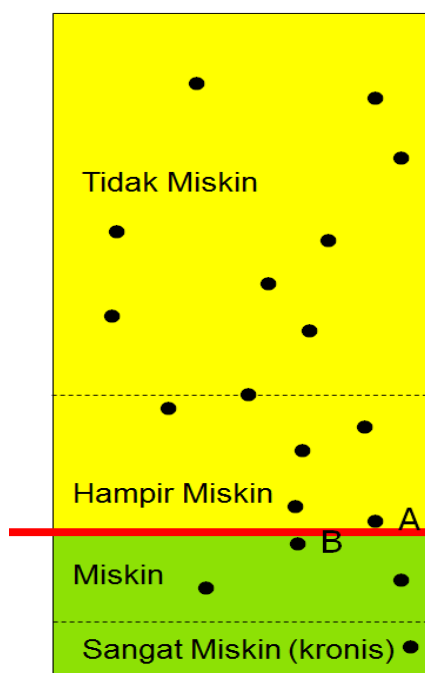
Persentase penduduk miskin nasional adalah:

$$\%PM_I = \frac{PM_I}{P_I} \cdot 100$$

$\%PM_I$ = Persentase penduduk miskin (secara nasional).

PM_p = Jumlah penduduk miskin (secara nasional).

P_I = Jumlah penduduk Indonesia.



KOMPONEN GARIS KEMISKINAN (GK):

1. **GK Makanan** => setara dengan pemenuhan kebutuhan kalori 2100 kkal per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi
2. **GK Non Makanan** => kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan (51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan)

Garis Kemiskinan

(berbeda untuk setiap provinsi.
Tahun 2016: Jawa Tengah Rp 317 348;
Kabupaten Magelang Rp 271 800)

2.5.2 Indikator Kemiskinan Konsumsi

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu:

1. *Head Count Index (HCI-P₀)*, yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P₁*) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
3. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P₂*) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.
4. Foster-Greer-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha},$$

α = 0, 1, 2

z = Garis kemiskinan

y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,\dots,q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = Jumlah penduduk

Jika $\alpha=0$, diperoleh *Head Count Index (P₀)*, jika $\alpha=1$ diperoleh Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index-P₁*) dan jika $\alpha=2$ disebut Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index-P₂*).

2.6. Desain Pengukuran

Pengukuran tingkat kemiskinan dan distribusi pendapatan biasanya didekati dengan menggunakan data pengeluaran, karena data pendapatan masyarakat tersebut ternyata masih sulit diperoleh. Dalam hal ini analisis tingkat kemiskinan dan distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga dari

hasil Susenas. Bagaimana pun juga, distribusi pengeluaran tidak akan sama dengan distribusi pendapatan. Namun cara ini dianggap sebagai pendekatan yang rasional untuk melihat trend dari distribusi pendapatan, walaupun harus diinterpretasikan secara hati-hati.

Melalui kegiatan Susenas, nilai pendapatan masyarakat Kabupaten Magelang diestimasi dari data konsumsi dengan pendekatan rata-rata pengeluaran rumah tangga perbulan. Data yang dikumpulkan adalah data konsumsi yang mencakup seluruh kebutuhan hidup masyarakat. Mengingat jumlah komoditi yang dikonsumsi oleh masyarakat sangat banyak dan beragam, maka dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu konsumsi kelompok makanan dan konsumsi kelompok bukan makanan.

A. Konsumsi makanan, meliputi :

1. Konsumsi padi-padian (Beras, jagung terigu, dll)
2. Konsumsi umbi-umbian (ketela, kentang, sagu, dll)
3. Konsumsi ikan/udang/cumi/kerang (segar dan diawetkan)
4. Konsumsi daging (sapi, kerbau, kambing, ayam dll)
5. Konsumsi telur dan susu
6. Konsumsi sayur-sayuran (bayam, wortel, cabe, dll)
7. Konsumsi kacang-kacangan
8. Konsumsi buah-buahan
9. Konsumsi Minyak dan lemak
10. Konsumsi bahan minuman (gula, teh, kopi, coklat, sirup, dll)
11. Konsumsi bumbu-bumbuan (garam, kemiri, merica, terasi, kecap, dll)
12. Konsumsi lainnya (mie instan/basah, bihun, makaroni, kerupuk dll)
13. Konsumsi makanan dan minuman jadi (roti, biskuit, bakso, nasi rames, minuman beralkohol dan non alkohol)
14. Konsumsi tembakau dan sirih.

B. Konsumsi non makanan, meliputi :

1. Perumahan dan fasilitas rumah tangga (sewa/perkiraan sewa, pemeliharaan/perbaikan ringan, rekening listrik/air/telepon, gas, minyak tanah, pulsa dll)

2. aneka barang dan jasa (sabun/kosmetik, biaya kesehatan, pendidikan, transport, jasa lainnya.
3. Pakaian, alas kaki dan tutup kepala.
4. Barang tahan lama (alat rumahtangga, elektronik dll)
5. Pajak, pungutan dan asuransi.
6. Keperluan pesta dan upacara, tidak termasuk makanan.

Untuk konsumsi makanan ditanyakan selama seminggu terakhir, baik yang berasal dari pembelian, produksi sendiri maupun dari pemberian. Sedang untuk pengeluaran bukan makanan ditanyakan kondisi sebulan yang lalu dan satu tahun terakhir, baik yang berasal dari pembelian, produksi sendiri maupun dari pemberian. Desain kuesioner secara detail dibuat dengan harapan responden mampu mengingat nilai konsumsi yang dikeluarkannya.

2.7. Kalori

Kalori adalah satuan ukuran untuk energi. Satu kalori secara resmi didefinisikan sebagai jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 cm³ air (atau 1 gram air) sebesar satu derajat Celcius. Untuk mengukur jumlah energi dalam makanan, ahli giziumnya menggunakan kilokalori (setara dengan 1000 kalori), dan label pengukuran mencantumkan sebagai “kkal” atau sebagai “Kalori” dengan “K” besar. Satu kkal setara dengan sekitar 4,184 kalori



BAB 3

ANALISIS KEMISKINAN

BAB 3

ANALISIS KEMISKINAN

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka.

Perubahan tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat melalui analisis tren tingkat kemiskinan antara kondisi tahun 2007 sampai dengan tahun 2016. Analisis ini mencakup garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan, serta profil rumah tangga miskin.

3.1. Kondisi Kemiskinan

3.1.1. Kemiskinan Kabupaten Magelang Tahun 2007-2016

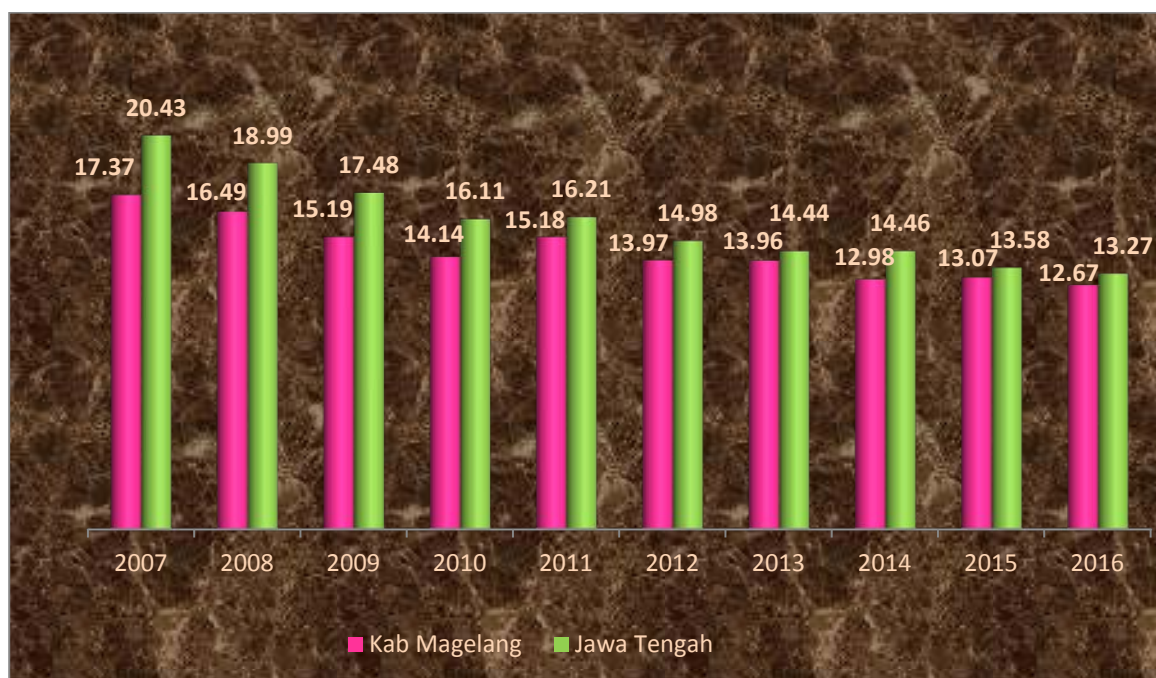
Persentase dan jumlah penduduk miskin Kabupaten Magelang Tahun 2007-2016 menunjukkan nilai yang semakin menurun. Pada Tahun 2007 penduduk miskin Kabupaten Magelang sebesar 17,37 persen atau sebanyak 200,1 ribu jiwa, turun menjadi 12,67 persen di Tahun 2016 atau menjadi sebanyak 158,9 ribu jiwa. Namun jika dilihat per tahun terjadi fluktuasi di tiap tahunnya.

Gambar 3.1 dan Tabel 3.1 menunjukkan perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang pada periode 2007-2016. Tingkat kemiskinan ini mencakup jumlah dan persentase penduduk miskin. Pada periode tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang relatif mengalami kecenderungan menurun dari tahun ke tahun. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin terjadi pada tahun 2010 dan 2011 dan dari tahun 2014 ke tahun 2015. Persentase penduduk miskin terendah di Kabupaten Magelang selama periode 2007 – 2016 terjadi pada tahun 2016 sebesar 12,67 persen, sedangkan persentase penduduk miskin tertinggi

terjadi pada tahun 2007 sebesar 17,37 persen.

Pada level provinsi, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah selama 2007—2016 menunjukkan penurunan. Pada tahun 2007, Persentase penduduk miskin mencapai 20,43 persen, kemudian turun menjadi 13,27 persen pada tahun 2016. Namun berbeda dengan kondisi kemiskinan di Kabupaten Magelang, angka kemiskinan di Jawa Tengah dari tahun ke tahun selalu menunjukkan nilai yang semakin menurun.

Gambar 3.1.1.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Magelang dan Jawa Tengah
Tahun 2007 – 2016



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Secara khusus untuk Tahun 2016 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Magelang jumlahnya berkurang dibanding tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskin Tahun 2016 sebanyak 158,9 ribu jiwa atau sebesar 12,67 persen, lebih rendah dibanding jumlah penduduk miskin di Tahun 2015 yang sebesar 162,4 ribu jiwa atau sebesar 13,07 persen. Hal ini menunjukkan terjadi pengurangan penduduk miskin sebesar 2,16 persen atau sekitar sebanyak 3,5 ribu jiwa. Kondisi ini menunjukkan kondisi yang bagus setelah sebelumnya penduduk miskin mengalami kenaikan dari 12,98 persen di Tahun 2014 menjadi 13,07 persen di Tahun 2015.

Tabel 3.1.1
Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah
Penduduk Miskin Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2007 – 2016

No	Tahun	Persentase Penduduk Miskin		Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribuan)	
		Kabupaten Magelang	Jawa Tengah	Kabupaten Magelang	Jawa Tengah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2007	17,37	20,43	200,1	6 557,2
2	2008	16,49	18,99	190,8	6 122,6
3	2009	15,19	17,48	176,5	5 655,4
4	2010	14,14	16,11	167,3	5 218,7
5	2011	15,18	16,21	179,6	5 256,0
6	2012	13,97	14,98	169,4	4 952,1
7	2013	13,96	14,44	171,0	4 811,3
8	2014	12,98	14,46	160,5	4 836,4
9	2015	13,07	13,58	162,4	4 577,0
10	2016	12,67	13,27	158,9	4 506,9

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

3.1.2. Garis Kemiskinan Tahun 2007-2016

Garis kemiskinan di Kabupaten Magelang pada periode 2007 - 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp 145 162,- perkapita perbulan yaitu dari Rp 126 638,- pada tahun 2007 menjadi Rp 271 800,- pada tahun 2016 atau mengalami peningkatan rata-rata sebesar Rp 14 516,- pada tiap tahunnya. Secara persentase meningkat rata-rata sebesar 8,48 persen pertahunnya.

Pada tahun 2007 di Kabupaten Magelang seseorang harus mampu mengeluarkan minimal Rp.126 638,- sebulan untuk tidak tergolong dalam kelompok penduduk miskin. Jadi apabila dalam suatu rumah tangga terdiri dari 4 anggota rumah tangga maka setiap bulannya rumah tangga tersebut harus mengeluarkan minimum Rp.506 552,- untuk tidak tergolong dalam kelompok penduduk miskin. Namun sepuluh tahun kemudian (2016),

kenaikan harga barang-barang konsumsi telah menaikkan garis kemiskinan menjadi Rp. 271 800,- atau jika dalam rumah tangga terdiri dari 4 anggota rumah tangga maka untuk tidak tergolong dalam kelompok penduduk miskin rumah tangga tersebut harus mengeluarkan minimum Rp. 1 087 200,- setiap bulannya.

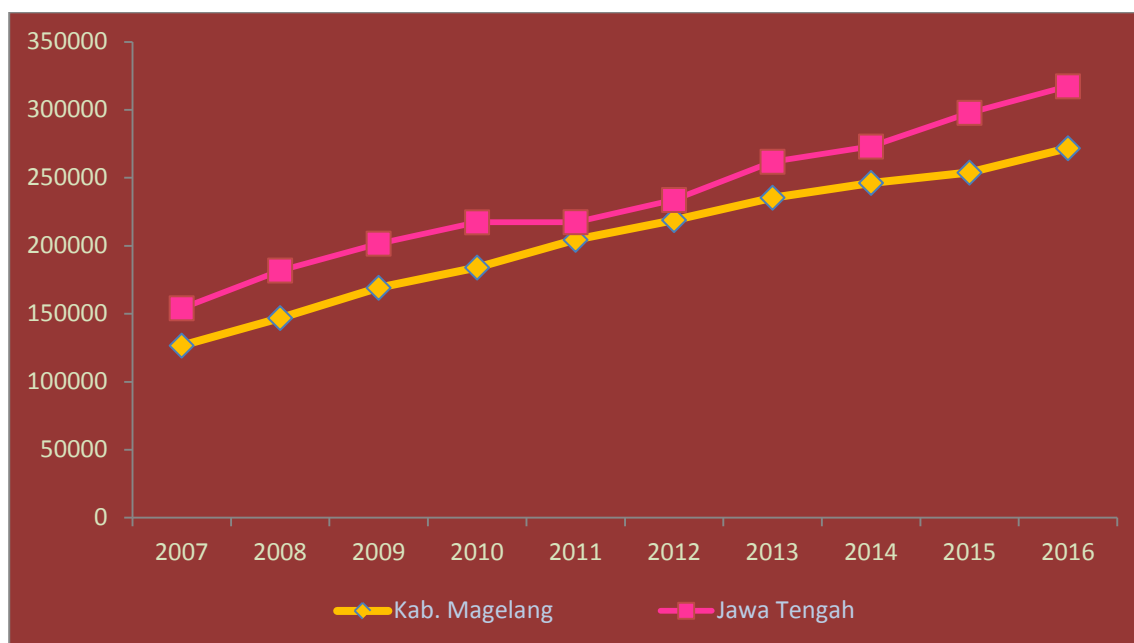
Garis kemiskinan tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 7,06 persen dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp. 253 866,- di Tahun 2015 menjadi Rp. 271 800,- di Tahun 2016. Kenaikan garis kemiskinan ini merupakan akibat dari kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk.

Tabel 3.1.2.
Garis Kemiskinan Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2007 – 2016

No	Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)	
		Kabupaten Magelang	Jawa Tengah
(1)	(2)	(3)	(4)
2	2007	126 638	154 111
3	2008	146 910	181 877
4	2009	169 158	201 651
5	2010	184 053	217 327
6	2011	204 430	217 440
7	2012	218 950	233 769
8	2013	235 430	261 881
9	2014	246 292	273 056
10	2015	253 866	297 851
10	2016	271 800	317 348

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Gambar 3.1.2
Garis Kemiskinan Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2007 – 2016



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

3.1.3 Tingkat Kedalaman Kemiskinan serta Tingkat Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Indikator *Headcount Index/Head Count Ratio* (P_0) atau dengan melihat persentase penduduk miskin terhadap total penduduk, tidak dapat mengindikasikan seberapa parah/dalam tingkat kemiskinan yang terjadi, mengingat ukuran ini tetap tidak berubah jika seorang yang miskin menjadi lebih miskin.

Oleh karena itu, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah indikator kemiskinan yang lain yaitu tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*, P_1) dan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity index*, P_2). Tingkat kedalaman kemiskinan menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Namun demikian, indeks ini tidak sensitif terhadap distribusi pendapatan di antara penduduk miskin sehingga dibutuhkan indikator lain guna mengukur tingkat keparahan kemiskinan.

Penurunan pada P_1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan yang mengindikasikan berkurangnya kedalaman kemiskinan. Sedangkan penurunan pada P_2 mengindikasikan berkurangnya ketimpangan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Tabel 3.1.3.
Tingkat Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index, P_1) serta Tingkat Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*, P_2) Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 – 2016

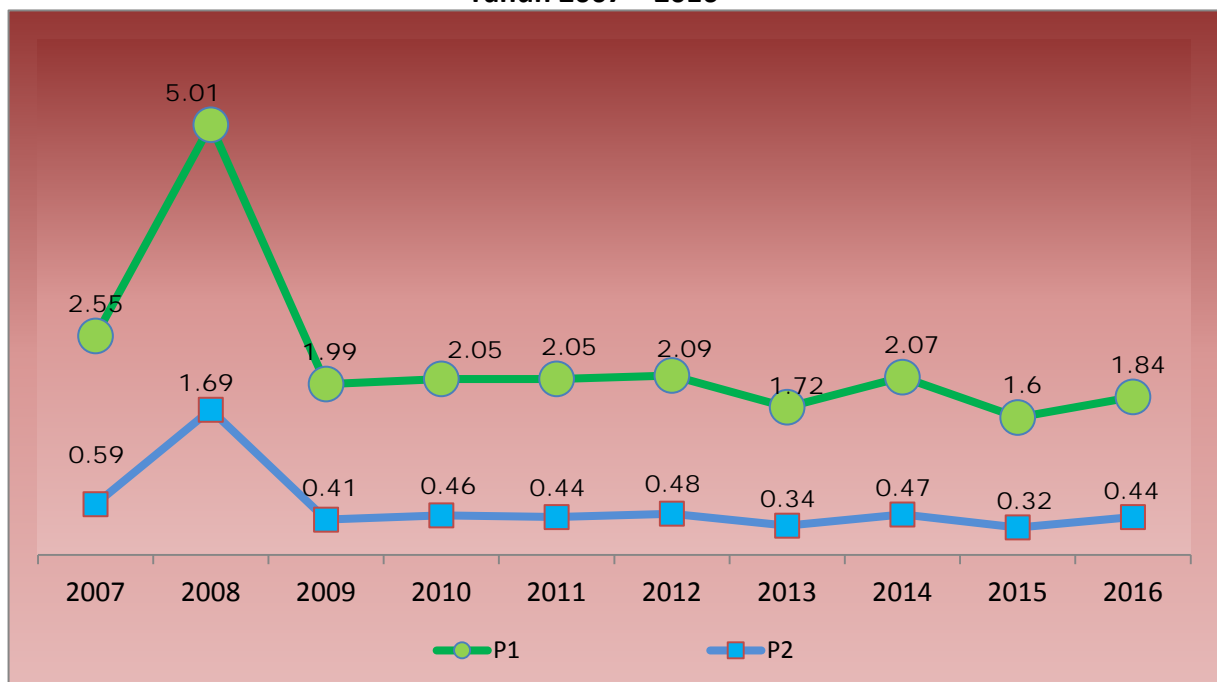
No	Tahun	P_1 (Kedalaman Penduduk Miskin)		P_2 (Keparahan Penduduk Miskin)	
		Kabupaten Magelang	Jawa Tengah	Kabupaten Magelang	Jawa Tengah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2007	2,55	3,84	0,59	1,08
2	2008	5,01	4,25	1,69	1,24
3	2009	1,99	2,89	0,41	0,87
4	2010	2,05	2,62	0,46	0,68
5	2011	2,05	2,58	0,44	0,66
6	2012	2,09	2,39	0,48	0,57
7	2013	1,72	2,37	0,34	0,59
8	2014	2,07	2,25	0,47	0,56
9	2015	1,60	2,44	0,32	0,65
10	2016	1,84	2,37	0,44	0,63

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Pada periode tahun 2007 – tahun 2016, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) Kabupaten Magelang semakin menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 2,55

pada tahun 2007 menjadi 1,84 pada tahun 2016. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan pendapatan masyarakat miskin yang ditandai dengan rata-rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin rendah. Indeks kedalaman kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 5,01 dan tahun 2007 sebesar 2,55

Gambar 3.1.3
Tingkat Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*, P_1) dan
Tingkat Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*, P_2) Kabupaten Magelang
Tahun 2007 – 2016



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Indeks keparahan kemiskinan mempunyai kondisi yang sejalan dengan nilai indeks kedalaman kemiskinan. Pada saat indeks kedalaman kemiskinan meningkat, maka indeks keparahan kemiskinan juga memperlihatkan nilai yang sama. Pada Tahun 2007 indeks keparahan kemiskinan 0,59 dan menjadi 0,44 di Tahun 2016. Indeks keparahan kemiskinan tertinggi terjadi pada Tahun 2008 sebesar 1,69 dan Tahun 2007 sebesar 0.59.

Secara khusus dilihat pada Tahun 2016, nilai indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan menunjukkan nilai yang meningkat dibanding Tahun 2015. Nilai ini berlawanan dengan persentase penduduk miskin dan jumlah penduduk miskin yang menunjukkan penurunan. Pada Tahun 2016 indeks kedalaman kemiskinan sebesar

1,84, lebih tinggi dibanding Tahun 2015 yang sebesar 1,60. Sedangkan nilai indeks keparahan kemiskinan naik dari 0,32 di Tahun 2015 menjadi 0,44 di Tahun 2016. Kenaikan tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan menimbulkan permasalahan dalam penurunan kemiskinan. Karena indeks kedalaman naik maka tingkat kemiskinan semakin dalam, jarak antara pengeluaran penduduk miskin dan garis kemiskinan akan semakin jauh dan semakin sulit mengentaskan kemiskinan.

3.2. Karakteristik Penduduk Miskin

3.2.1. Pendidikan

Pendidikan mempunyai peran penting dalam program pengentasan kemiskinan. Tingkat pendidikan penduduk sangat berperan penting dalam peningkatan sumber daya manusia, karena tingkat pendidikan berperan dalam pembentukan karakter, pola pikir, kemampuan bersosialisasi dalam masyarakat, dan tingkat kepercayaan diri penduduk untuk bersaing di dunia kerja. Tidak hanya berguna dalam persaingan dalam mencari pekerjaan namun juga berperan dalam ketangguhan penduduk dalam usaha untuk mencari alternatif penghidupan yang lebih baik. Bagi pemerintah, pembangunan dalam bidang pendidikan juga memberikan keuntungan antara lain untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja, meningkatkan taraf hidup penduduk, mengurangi ketimpangan pendapatan dan akhirnya mengentaskan masalah kemiskinan.

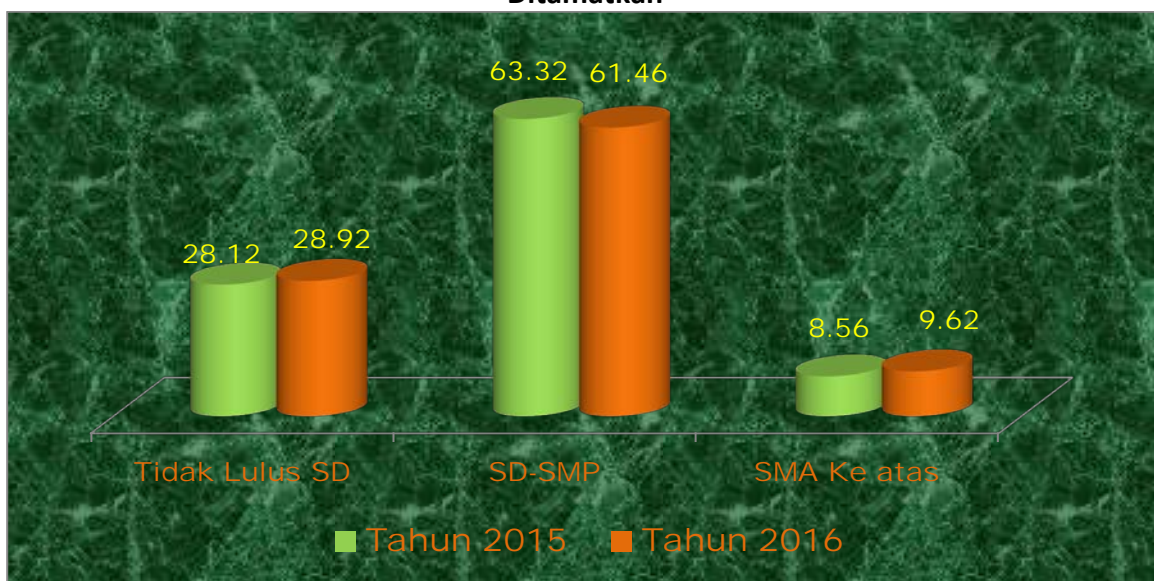
Pada kondisi rumah tangga miskin, pendidikan tentu belum menjadi prioritas karena bagi mereka memenuhi kebutuhan primernya saja masih mengalami kesulitan. Dengan kondisi ini, kemiskinan akan menjadi lingkaran setan, dimana anak yang lahir dari keluarga miskin akan mempunyai tingkat pendidikan yang rendah sehingga kedepannya dengan pendidikan yang rendah hanya bisa mendapatkan pekerjaan yang hasilnya tidak tetap dan tidak bisa meningkatkan kesejahteraannya. Selain itu pola pikir orang tua dari anak usia sekolah yang berada dalam kondisi miskin juga belum begitu sadar akan pentingnya pendidikan untuk masa depan anaknya, sehingga tidak bisa memberikan motivasi bagi anaknya dan semangat berjuang untuk bisa memenuhi kebutuhan bersekolah anaknya masih rendah.

Dalam masalah pendidikan, pemerintah memang sudah membuat berbagai program untuk mengentaskan masalah pendidikan. Program tersebut diantaranya adalah

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dengan program tersebut untuk tingkat pendidikan dasar negeri (setingkat SD dan SMP) bisa digratiskan dalam biaya bulanan. Selain itu ada program Indonesia Pintar maupun Bantuan Siswa Miskin. Diharapkan dengan berbagai program ini dapat digunakan sebagai solusi untuk peningkatan pendidikan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Beberapa indikator yang bisa digunakan untuk melihat gambaran pendidikan antara lain tingkat pendidikan yang ditamatkan, Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah.

Gambar 3.2 1.1.
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Keatas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan



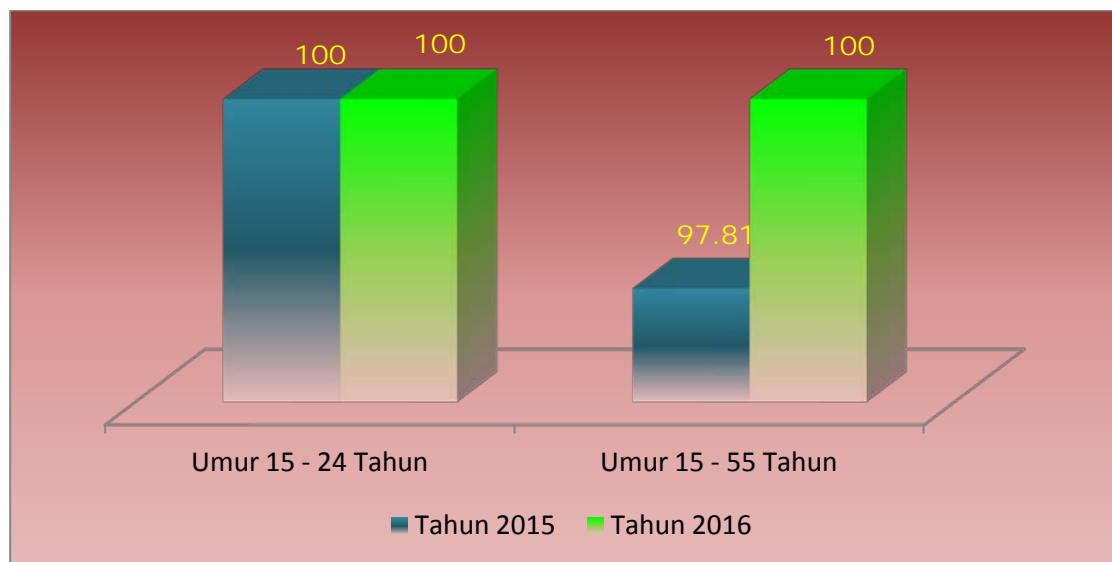
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Gambaran tingkat pendidikan penduduk miskin umur 15 tahun ke atas berdasarkan hasil Susenas Maret Tahun 2015 dan Tahun 2016 bisa dilihat pada gambar di atas. Sebagian besar penduduk miskin usia 15 tahun ke atas cenderung tamat SD dan SMP yaitu sebanyak 63,32 persen di Tahun 2015 dan 61,46 persen di Tahun 2016. Sedangkan untuk pendidikan tertinggi lulus SLTA ke atas pada Tahun 2016 sebesar 9,62 persen, lebih tinggi dibanding Tahun 2015 yang sebesar 8,56 persen.

Angka Melek Huruf (AMH) penduduk miskin untuk kelompok umur 15 – 24 Tahun dari hasil Susenas Tahun 2015 dan Tahun 2016 sebesar 100 persen, yang artinya semua

penduduk miskin umur 15 – 24 tahun bisa membaca dan menulis huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya. Sedangkan untuk kelompok umur 15 – 55 tahun, AMH Tahun 2015 sebesar 97,81 persen dan Tahun 2016 sebesar 100 persen. Angka Melek Huruf merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.

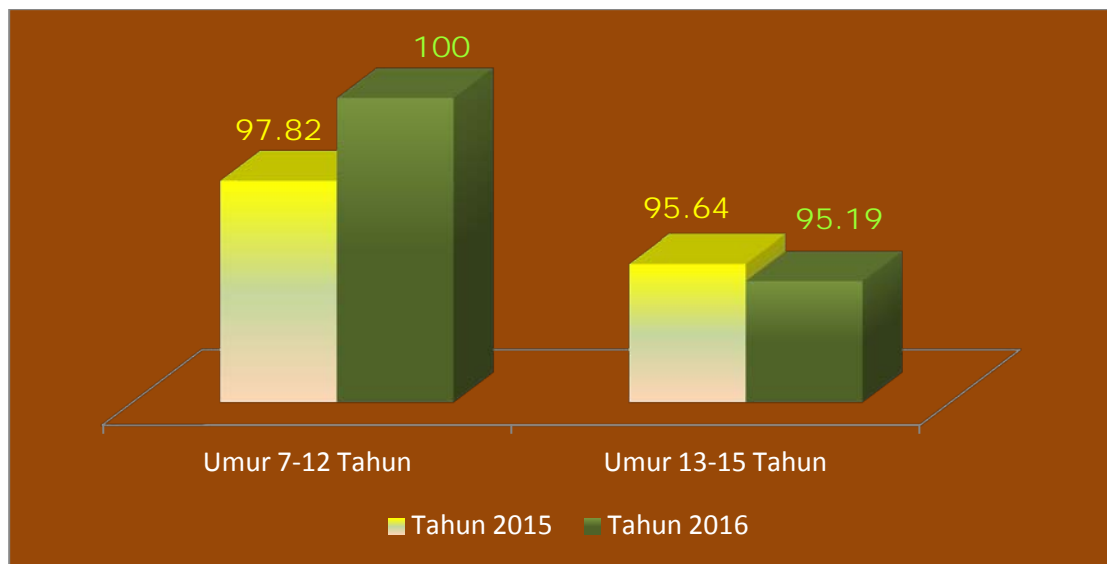
Gambar 3.2.1.2.
Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Miskin Umur 15 – 24 Tahun dan 15 – 55 Tahun



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Indikator lain yang digunakan untuk melihat tingkat pendidikan penduduk adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka Partisipasi Sekolah merupakan proporsi semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Penghitungan ini memasukkan pendidikan non formal yaitu kejar paket A, Paket B dan Paket C. Dari Hasil Susenas, APS penduduk miskin umur 7 – 12 tahun pada Tahun 2015 sebesar 97,82 persen. Angka ini menunjukkan bahwa sebesar 97,82 persen penduduk miskin yang berumur 7 – 12 Tahun masih bersekolah. Pada Tahun 2016 APS umur 7-12 tahun lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 100 persen. Sedangkan untuk kelompok umur 13 – 15 tahun, nilai APS Tahun 2015 sebesar 95,64 persen dan Tahun 2016 sebesar 96,30 persen.

Gambar 3.2.1.3.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Miskin Umur 7 – 15 Tahun



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

3.2.2. Ketenagakerjaan

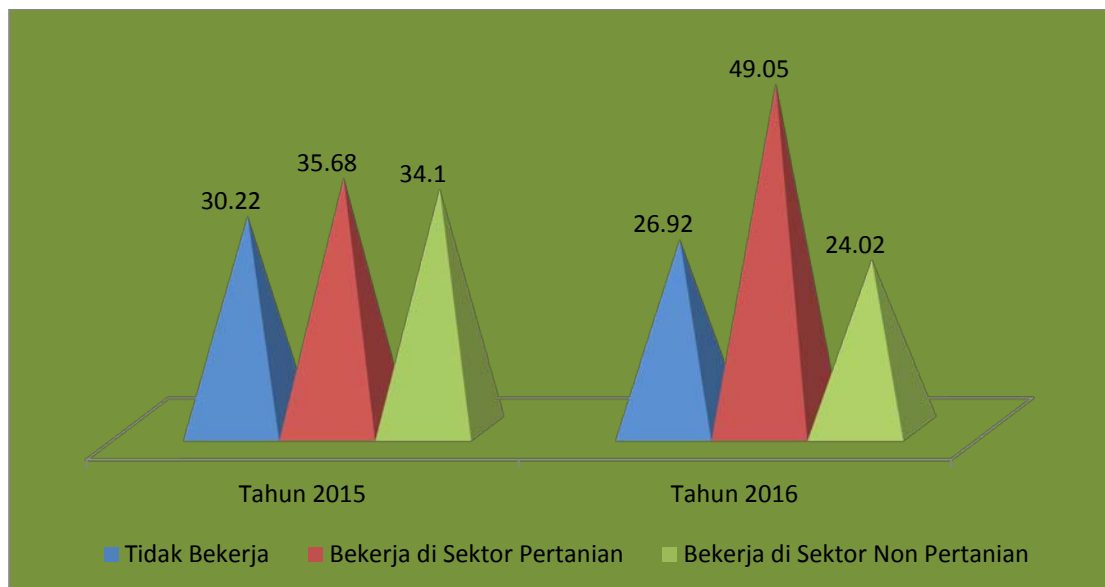
Ketenagakerjaan dalam masalah kemiskinan juga memegang peranan penting. Ketenagakerjaan berkaitan dengan sumber penghasilan rumah tangga yang sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan rumah tangga. Penggolongan penduduk miskin dan tidak miskin suatu rumah tangga juga didasarkan pada tingkat kesejahteraan yang ditentukan oleh rata-rata pengeluaran rumah tangga perkapita perbulan. Besarnya pengeluaran rumah tangga tentunya juga dipengaruhi oleh besarnya penghasilan yang diperoleh oleh semua anggotarumah tangga berdasarkan pekerjaan masing-masing.

Masalah ketenagakerjaan terutama berkaitan dengan penduduk yang bekerja. Bekerja disini adalah kegiatan penduduk miskin dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan yang dilakukan paling sedikit selama satu jam berturut-turut dalam seminggu terakhir. Dari hasil pendataan Susenas, persentase penduduk miskin yang bekerja pada Tahun 2015 sebesar 69,78 persen, dimana dari jumlah tersebut sebesar 35,68 persen bekerja di sektor pertanian dan sisanya 34,10 persen bekerja di sektor non pertanian. Sedangkan pada Tahun 2016 penduduk yang bekerja sebesar 72,2 persen, dimana 50,30 persen bekerja di sektor pertanian dan 21 90 persen bekerja di sektor non pertanian. Dari data dia atas dapat

dilihat bahwa penduduk miskin melekat pada mereka yang bekerja di sektor pertanian, seperti petani gurem, buruh tani, pekerja perkebunan dan pencari kayu.

Hasil dari Susenas juga menunjukkan terjadi pengurangan penduduk yang tidak bekerja dari tahun 2015 ke tahun 2016, dimana pada tahun 2015 penduduk usia kerja yang tidak bekerja sebesar 30,22 persen turun menjadi 26,92 persen di Tahun 2016. Penduduk yang tidak bekerja disini adalah penduduk miskin yang sedang mencari pekerjaan atau menganggur dan bukan angkatan kerja, termasuk mereka yang kegiatan sehari-harinya mengurus rumah tangga dan bersekolah.

Gambar 3.2.2.1
Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Keatas menurut Sektor Pekerjaan

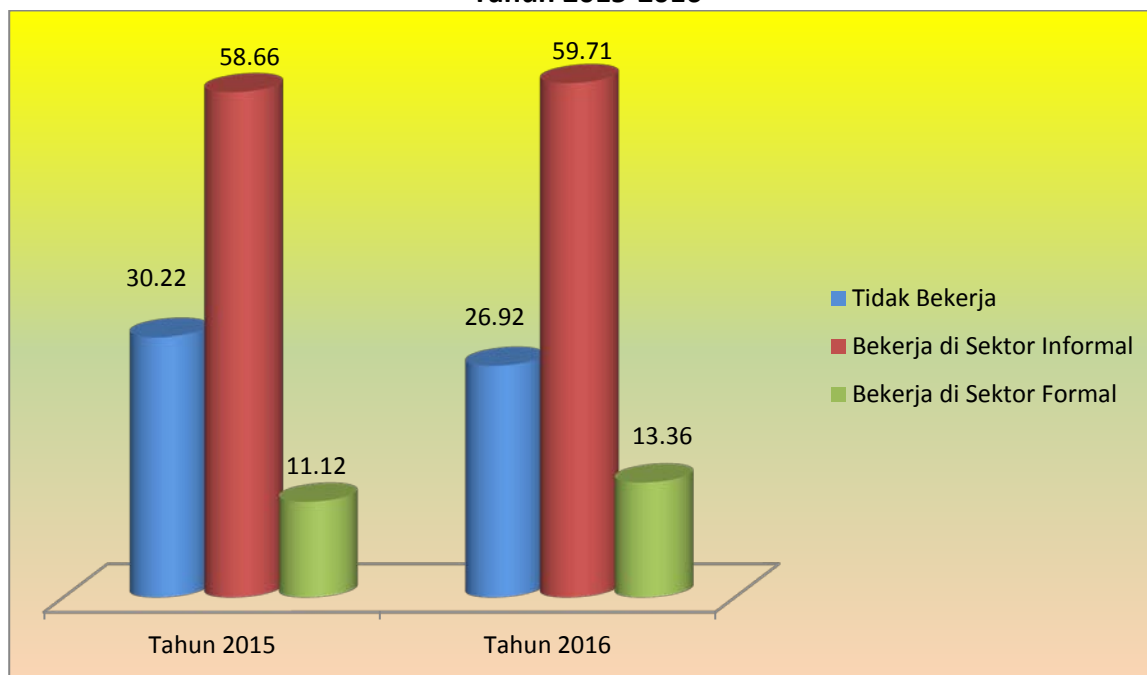


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Karakteristik penduduk miskin dilihat dari sisi ketenagakerjaan yang lain adalah status pekerjaan, yaitu penduduk yang bekerja di sektor formal dan sektor informal. Bekerja di sektor formal adalah penduduk miskin yang mempunyai status kedudukan dalam pekerjaan utamanya adalah bekerja dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Sedangkan bekerja di sektor informal adalah penduduk miskin yang status kedudukan dalam pekerjaannya adalah bekerja sendiri, bekerja dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas,

dan pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar.

Gambar 3.2.2.2
Persentase Penduduk Miskin Umur 15 Tahun Ke atas menurut Status Pekerjaan,
Tahun 2015-2016



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Sebagian besar penduduk miskin Kabupaten Magelang bekerja di sektor informal, baik tahun 2015 maupun tahun 2016. Pada Tahun 2015, jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor informal sebesar 58,66 persen dan 59,71 persen di Tahun 2016 dari total penduduk miskin umur 15 tahun ke atas.

3.2.3. Kesehatan

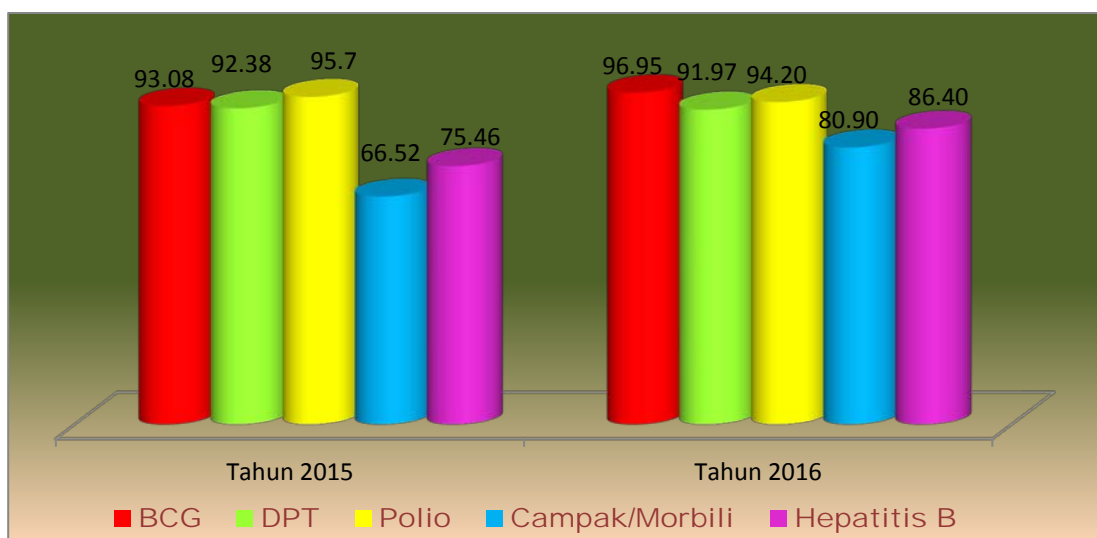
Tingkat kesehatan penduduk merupakan aspek penting lainnya dalam masalah pengentasan kemiskinan dan peningkatan derajat kesejahteraan rakyat selain dimensi pendidikan dan ketenagakerjaan. Penduduk yang mempunyai tingkat kesehatan yang baik tentu akan mempunyai produktifitas yang semakin tinggi. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan jangka panjang adalah program kesehatan untuk balita. Beberapa indikator kesehatan yang berkaitan dengan hal ini adalah pemberian imunisasi pada balita dan keikutsertaan dalam program KB..

Program imunisasi merupakan langkah untuk mencegah penyakit menular,

penyakit yang bisa menyebabkan kematian dan kecacatan. Kesadaran akan pentingnya pemberian imunisasi untuk kelangsungan hidup dan kualitas kesehatan penduduk, pemerintah sudah memberikan fasilitas untuk imunisasi di berbagai fasilitas kesehatan. Tinggal bagaimana kesadaran penduduk untuk memanfaatkan dan menyadari bagaimana pentingnya pemberian imunisasi tersebut.

Kesadaran penduduk miskin untuk melakukan imunisasi berdasarkan sampel pencacahan Susenas Tahun 2016 sudah lebih baik dibanding Tahun 2015. Pada Tahun 2016 tingkat pemberian imunisasi sudah diatas 80 persen untuk semua jenis imunisasi, sedangkan di tahun sebelumnya untuk imunisasi campak dan hepatitis B masih di kisaran 66,52 persen dan 75,46 persen.

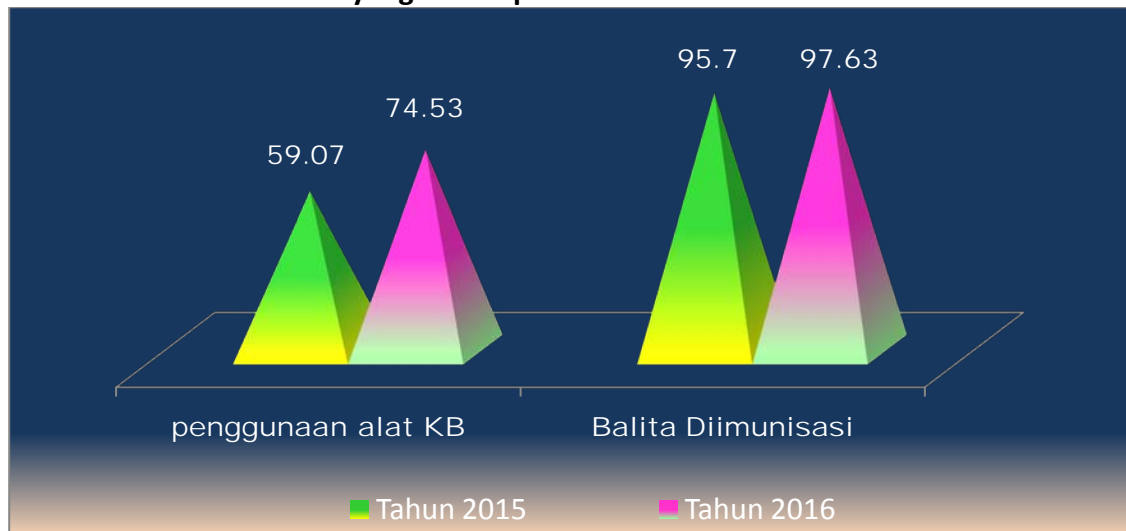
Gambar 3.2.3.1
Pemberian Imunisasi Balita Miskin Berdasarkan Jenis Imunisasi Tahun 2015-2016



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Indikator kesehatan lain adalah keikutsertaan penduduk miskin dalam program KB yang bisa dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan penduduk pengguna alat kontrasepsi. Penduduk pengguna alat kontrasepsi adalah perempuan di rumah tangga miskin berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin, cerai hidup, dan cerai mati yang menggunakan alat KB maupun cara tradisional dengan tujuan untuk menunda kehamilan.

Gambar 3.2.3.2
Persentase Perempuan Miskin Umur 15-49 Tahun yang mengikuti Program KB dan
Balita Miskin yang mendapatkan Imunisasi Tahun 2015-2016



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Pada Tahun 2016, perempuan berumur 15-49 tahun yang mengikuti program KB sebanyak 74,53 persen. Angka ini lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 59,07 persen.

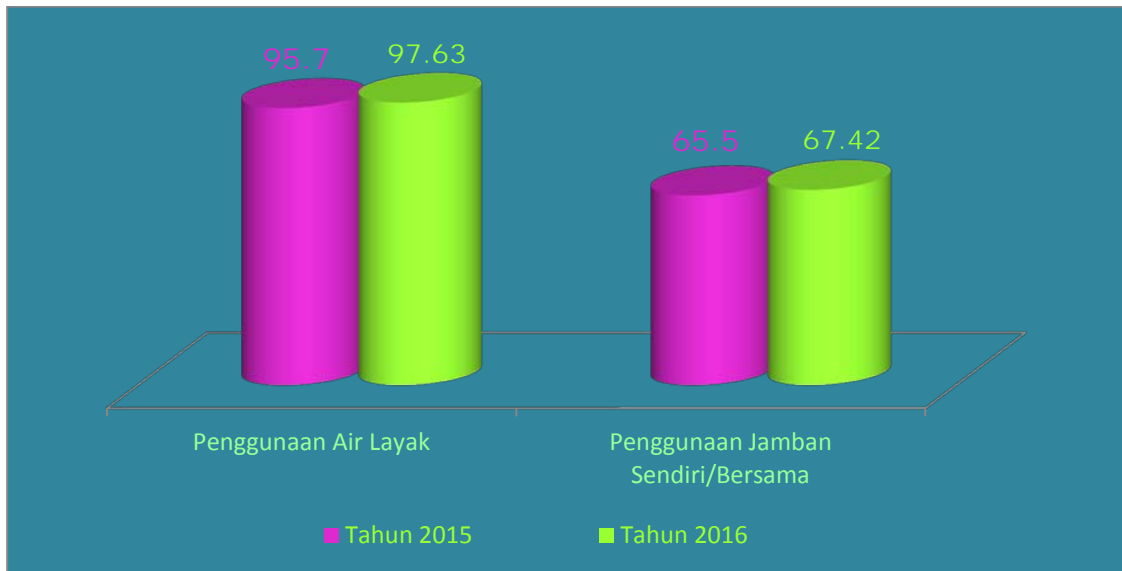
3.2.4 Fasilitas Perumahan

Fasilitas yang dimiliki oleh suatu tempat tinggal mempengaruhi tingkat kenyamanan dan kesehatan penghuninya. Tingkat kesehatan tempat tinggal juga mempengaruhi kesehatan rumah tangga yang tinggal didalamnya. Ketersediaan air bersih terutama untuk fasilitas air minum dan fasilitas jamban yang dimiliki rumah tangga bisa dijadikan indikator untuk menunjukkan rumah sehat.

Ketersediaan fasilitas air bersih untuk sumber air minum penduduk miskin menunjukkan nilai yang cukup baik. Dari hasil pendataan Susenas Tahun 2016 dapat dilihat bahwa 97,63 persen penduduk miskin sudah menggunakan air layak untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Nilai ini sudah lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 95.7 persen. Rumah tangga pengguna air layak yang dimaksud disini adalah air minum yang sumbernya dari air terlindung yaitu ledeng meteran, ledeng eceran, dan sumur bor/pompa, sumber terlindung, dan mata air terlindung yang jarak penampungan kotoran atau limbah lebih dari 10 meter atau air minum yang sumbernya dari air terlindung namun jarak ke penampungan kotoran/limbah kurang dari 10 m atau

air tidak terlindung tapis ember untuk mandi/cuci dan lain-lain dari air terlindung.

Gambar 3.2.4.
Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Bersih Layak Konsumsi dan yang Menggunakan Jamban Sendiri/ Bersama Tahun 2015-2016



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Ketersediaan jamban menjadi salah satu indikator dalam melihat baik buruknya fasilitas perumahan. Selain ketersediaan jamban, indikator penggunaan fasilitas jamban juga melihat ketersediaan jamban tersebut milik sendiri, jamban bersama, jamban umum, dan tidak tersedianya fasilitas jamban. Pada Tahun 2016 rumah tangga miskin yang sudah menggunakan jamban sendiri atau bersama adalah sebanyak 67,42 persen, sedikit lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 65,5 persen.

3.3. Program Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah melakukan berbagai langkah konsolidasi dalam upaya untuk menanggulangi kemiskinan. Langkah pemerintah tersebut diwujudkan dalam 4 paket bantuan program untuk penduduk. Paket tersebut adalah:

1. Paket Bantuan Program I, berupa Bantuan dan Perlindungan Sosial yang ditujukan untuk perlindungan dan pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan, pangan,

sanitasi dan air bersih. Paket ini diwujudkan dalam bentuk beras miskin (raskin), Jamkesmas, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

2. Paket Bantuan Program II, berupa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak atas berpartisipasi, kesempatan kerja dan berusaha, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan perumahan.
3. Paket Bantuan Program III, yang berupa Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK-KUR)
4. Paket Bantuan Program IV, yang meliputi perumahan, transportasi, air bersih, listrik untuk rakyat miskin, nelayan miskin dan kelompok rentan di perkotaan.

Program raskin adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan social di bidang pangan yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan sasaran penduduk yang miskin dan penduduk rentan miskin. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran dalam memenuhi kebutuhan pokok dalam bentuk beras. Persentase rumah tangga miskin yang pernah membeli raskin pada quartile 1 Tahun 2016 sebesar 86,75 persen, lebih tinggi dibanding rumah tangga miskin yang menerima raskin Tahun 2015 yang sebanyak 69,93 persen. Rata-rata rumah tangga miskin tersebut membeli raskin 5,07 kg perbulan dengan harga Rp. 2.199,-.

Tabel 3.3.1
Persentase Rumah Tangga Miskin Penerima Raskin, Rata-rata Banyaknya Raskin yang diterima dan Rata-rata Harga Raskin Perkg, Tahun 2015-2016

Komponen	Tahun 2015	Tahun 2016
(1)	(2)	(3)
Persentase Penerima Raskin (persen)	69,93	86,75
Rata-Rata Raskin yang Diterima (Kg)	4,94	5,07
Rata-rata Harga Raskin per Kg (Rp.)	2.207	2.199

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Program pemerintah dalam bidang kesehatan adalah Program Jaminan Kesehatan Nasional. Program ini bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia. Peserta dalam program ini melingkupi seluruh penduduk Indonesia yang dibedakan dengan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) termasuk dalam hal ini penerima Jamkesmas dan Peserta Non Penerima Bantuan PBI. Selain program dari pemerintah pusat, ada juga jaminan kesehatan yang berasal dari perusahaan untuk penduduk yang bekerja di perusahaan bersangkutan. Sedangkan pemerintah daerah juga menyelenggarakan jaminan kesehatan tambahan untuk masyarakat miskin yang belum masuk dalam jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin program dari pemerintah pusat dalam bentuk Jamkesda. Dengan berbagai program jaminan kesehatan ini diharapkan dapat mengurangi beban penduduk miskin dalam meningkatkan kualitas hidupnya sehingga bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya bisa menjadi jalan pengentasan kemiskinan. Dari data Susenas Tahun 2016, sebanyak 35,6 persen penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan berupa jamkesmas, 15,5 persen mempunyai jaminan kesehatan BPJS Kesehatan, dan 3,1 persen menerima jaminan kesehatan berupa Jamkesda. Sedangkan penduduk miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan sebanyak 44,8 persen.

Tabel 3.3.2
Persentase Penduduk Miskin Menurut Jaminan Kesehatan yang Dimiliki,
Tahun 2015-2016

Komponen	Tahun 2015	Tahun 2016
(1)	(2)	(3)
Jamkesmas/PBI/BPJS Kesehatan	41,6	35,6
Jamkesda	14,8	3,1
BPJS Kesehatan	3,3	15,5
BPJS Ketenagakerjaan	0,8	0,7
Askes/Asabri	1,0	0,3
Tanpa Jaminan Kesehatan	38,5	44,8

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Program penanggulangan kemiskinan yang lainnya adalah disediakanya kredit usaha yang bisa diakses oleh penduduk miskin. Kredit usaha bisa dijadikan salah satu cara dalam membangun perekonomian dan menciptakan lapangan kerja baru. Ada beberapa program kredit usaha yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun usaha perbankan, antara lain kredit usaha dari PNPM, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Bersama (KUBE), dan Kredit Usaha Bank Selain KUR.

Tabel 3.3.3
Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Kredit Usaha yang Diterima Setahun Terakhir, Tahun 2015-2016

Kredit Usaha	Tahun 2015	Tahun 2016
(1)	(2)	(3)
PNPM	3,3	1,1
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	0,9	1,0
Program Bank selain KUR	0,0	0,0
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	0,9	0,0
Program Koperasi	0,7	2,7
Perorangan dan Lainnya	2,5	4,5

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Dari table di atas dapat dilihat bahwa pemanfaatan kredit usaha oleh rumah tangga miskin masih sangat kecil. Rumah tangga yang memanfaatkan kredit usaha dari PNPM Tahun 2016 hanya sebesar 1,1 persen, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 1,0 persen.

Di bidang pendidikan, pemerintah sudah mengeluarkan program pendidikan melalui Biaya Operasional Sekolah (BOS). Namun pada kenyataannya di lapangan masih ada rumah tangga miskin yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan lainnya, seperti kebutuhan buku, alat tulis, seragam, sepatu, biaya transportasi, dan lainnya yang tidak masuk dalam tanggungan BOS. Kondisi ini menjadi latar belakang pemerintah mengembangkan Bantuan Siswa Miskin (BSM). Dari hasil Susenas Tahun 2016 rumah tangga miskin yang memiliki anak bersekolah di SD sebanyak 81 persennya mendapat BSM. Nilai ini lebih tinggi dibanding hasil pencacahan Susenas Tahun sebelumnya yang

sebesar 66,4 persen. Untuk rumah tangga yang mempunyai anak Sekolah Menengah Pertama dan Sederajat, sebanyak 39,5 persen mendapatkan BSM, lebih tinggi dibanding Tahun sebelumnya yang sebesar 33,6 persen. Sedangkan rumah tangga yang mempunyai anak sekolah di Sekolah Menengah baik umum maupun kejuruan yang mendapatkan BSM sebesar 8,6 persen.

Tabel 3.3.4
Persentase Penduduk Miskin yang Bersekolah dan Mendapatkan Bantuan Siswa Miskin (BSM), Tahun 2015-2016

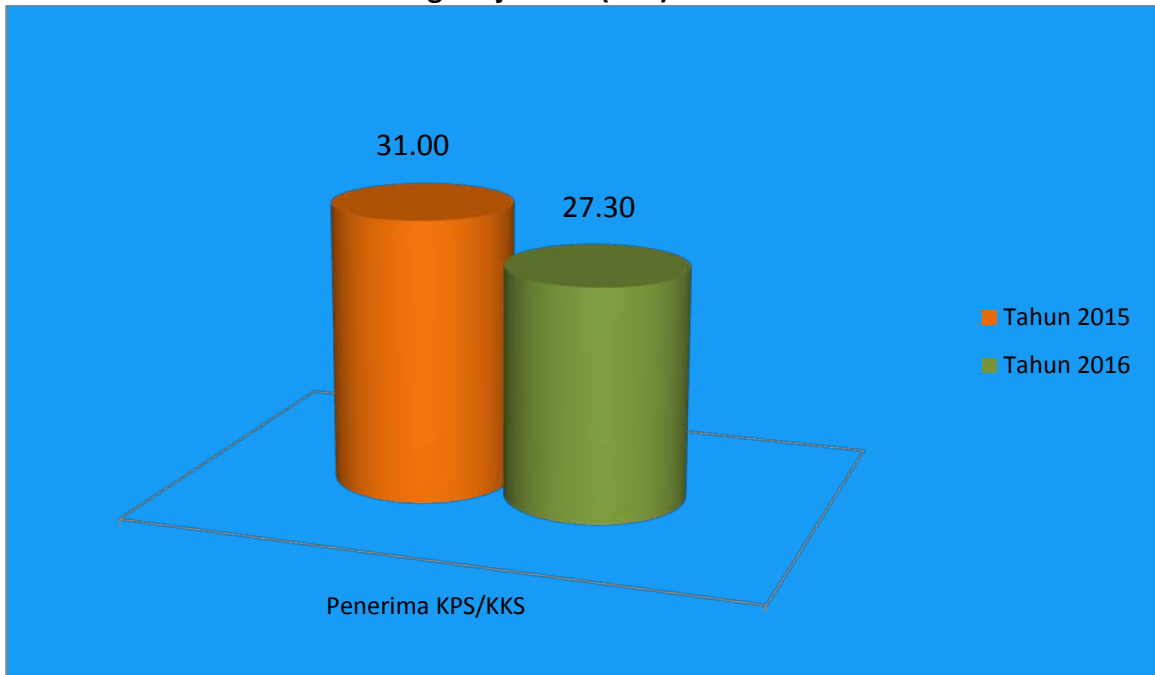
Bantuan Siswa Miskin (BSM)	Tahun 2015	Tahun 2016
(1)	(2)	(3)
SD/Sederajat	66,4	81,0
SMP/Sederajat	33,6	39,5
Sekolah Menengah/Sederajat	0,0	8,6

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Perhatian pemerintah kepada rumah tangga miskin diwujudkan dengan diterbitkannya Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penanda rumah tangga miskin. Kartu ini berguna untuk mendapatkan manfaat dari Program Raskin, BSM, dan BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat). Pemerintah pusat mengeluarkan kartu ini kepada 15,5 juta rumah tangga miskin dan rentan miskin yang merupakan 25 persen rumah tangga dengan status social ekonomi yang terendah.

Dari hasil pendataan Susenas Tahun 2015 dan Tahun 2016, rumah tangga miskin yang mendapatkan KPS atau KKS sebanyak 31 persen dan 27,3 persen.

Gambar 3.3.1
Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menerima Kartu Pelindungan Sosial (KPS) atau
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Tahun 2015-2016



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang



BAB 4

POLA KONSUMSI PENDUDUK

BAB 4

POLA KONSUMSI PENDUDUK

4.1 Rata-rata Pengeluaran Penduduk

Keadaan ekonomi rumahtangga di suatu daerah dapat diamati dari besar kecilnya tingkat pendapatan rumahtangga, atau dapat dikatakan juga bahwa tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat dari tingkat pendapatan per kapita. Namun demikian untuk memperoleh data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, maka pendekatan yang sering digunakan adalah pendekatan konsumsi rumahtangga.

Dalam ilmu ekonomi, pengertian konsumsi lebih luas dari pada pengertian konsumsi dalam percakapan sehari-hari. Dalam percakapan sehari-hari konsumsi hanya dimaksudkan sebagai hal yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Dalam ilmu ekonomi, semua barang dan jasa yang digunakan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya disebut pengeluaran konsumsi. Dikonsumsi artinya digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas, baik dalam jumlah maupun jenisnya. Untuk memperoleh berbagai kebutuhan tersebut seseorang memerlukan pengeluaran untuk konsumsi. Dari semua pengeluaran yang dilakukan tersebut sekurang-kurangnya dapat memenuhi tingkat kebutuhan minimum yang diperlukan.

Pola konsumsi penduduk merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk. Rata-rata pengeluaran penduduk didapat dengan membagi jumlah seluruh pengeluaran penduduk baik makanan, pendidikan, kesehatan, perumahan dan lain-lainnya dengan jumlah anggota rumah tangga keseluruhan. Rata-rata pengeluaran penduduk dapat digunakan untuk melihat pola konsumsi dan tingkat kesejahteraan dari penduduk yang bersangkutan.

Komposisi pengeluaran penduduk dapat dijadikan salah satu ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Semakin kecil persentase pengeluaran penduduk untuk konsumsi makanan merupakan indikasi tingkat kesejahteraan yang semakin baik. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dan bukan makanan berkaitan erat dengan tingkat pendapatan masyarakat. Di banyak wilayah yang sedang berkembang, pemenuhan kebutuhan makanan masih menjadi prioritas utama, Karena untuk

memenuhi kebutuhan gizi. Tabel 4.1 menampilkan persentase penduduk, rata-rata pengeluaran perkapita sebulan, dan persentase konsumsi makanan dan non makanan penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2016.

Tabel 4.1.
Persentase Penduduk dan Rata-rata pengeluaran perkapita Sebulan menurut Kelompok Pengeluaran , Tahun 2016

Kelompok Pengeluaran	% Penduduk	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan (RP)	Persentase	
			Makanan	Non Makanan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<150 000	-	-	-	-
150 000 – 199 999	3,44	177 141	61,07	38,93
200 000 – 299 999	17,22	259 032	60,23	39,77
300 000 – 499 999	38,66	381 041	58,18	41,82
500 000 – 749 999	18,37	609 156	55,38	44,62
750 000 – 999 999	8,63	874 367	50,30	49,70
1 000 000 – 1 499 999	7,66	1 181 912	43,81	56,19
>1 500 000	6,03	2 377 500	27,19	72,81
Kab. Magelang 2016		619 126	47,62	52,38
2015		535 110	49,65	50,35
2014		466 678	54,07	45,93
2013		439 594	53,98	46,02
2012		372 410	51,73	48,27

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Rata-rata pengeluaran penduduk Kabupaten Magelang per kapita sebulan hasil Susenas Maret 2016 sebesar Rp. 619 126,-. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan Tahun 2015 yang sebesar Rp. 535 110,- perkapita per bulan. Kenaikan ini dimungkinkan karena naiknya harga berbagai jenis kebutuhan penduduk karena pengaruh inflasi.

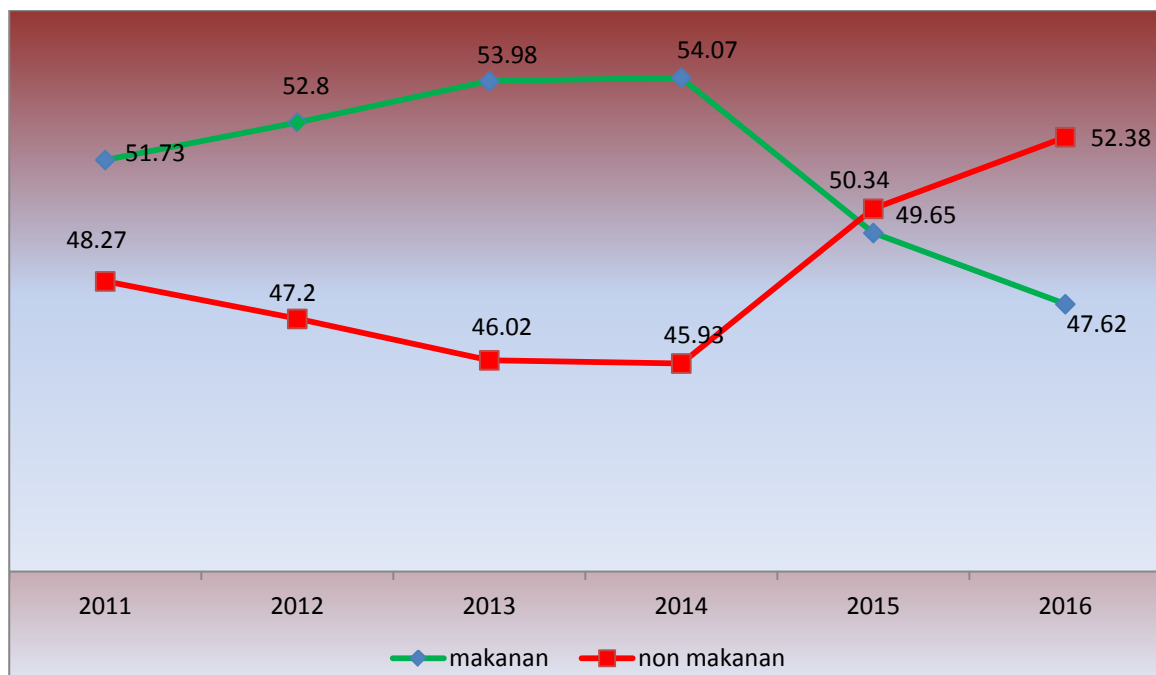
Dilihat dari kelompok pengeluaran penduduk, kelompok pengeluaran 300 000 – 499 999 rupiah mempunyai persentase tertinggi yaitu sebesar 38,66 persen. Nilai ini menunjukkan bahwa ada 38,66 persen penduduk yang mempunyai pengeluaran

perkapita sebulan antara 300 000 rupiah sampai 499 999 rupiah. Dalam urutan kedua sebesar 18,37 persen penduduk mempunyai pengeluaran di atara 500 000 rupiah dan 749 999 rupiah. Di urutan ketiga sebesar 17,22 persen penduduk mempunyai pengeluaran per kapita sebulan diantara 200 000 rupiah dan 299 999 rupiah. Hasil penghitungan ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk (sebesar 74,25 persen) mempunyai pengeluaran per kapita sebulan antara 200 000 rupiah dan 749 999 rupiah.

4.3. Pola Konsumsi Penduduk

Gambar 4.3.1

Komposisi Konsumsi Penduduk Kabupaten Magelang, 2011-2016



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Gambaran perkembangan pergeseran pola konsumsi rumah tangga Kabupaten Magelang Tahun 2011 – 2016 tersaji dalam Gambar4.2. Selanjutnya dengan komposisi distribusi pengeluaran tersebut mengindikasikan juga bahwa tuntutan kebutuhan untuk memenuhi konsumsi makanan masih merupakan tuntutan utama yang harus dipenuhi oleh penduduk Kabupaten Magelang. Komposisi pengeluaran seperti di atas tentunya

akan terus bergeser dengan semakin membesarnya porsi pengeluaran pada kelompok non makanan, jika kesejahteraan penduduk Kabupaten Magelang kian hari kian membaik.

Disamping menggunakan tingkat pendapatan/pengeluaran pada tahun 2015, tingkat kesejahteraan rumahtangga juga dapat diukur dari perkembangan komposisi konsumsi penduduk, berupa konsumsi makanan dan non makanan dari tahun 2010 sampai dengan 2015. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya kesejahteraan penduduk dikatakan semakin baik, apabila persentase pengeluaran untuk konsumsi makanan semakin kecil. Penduduk dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan penduduk tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan penduduk, makin kecil proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran penduduk.

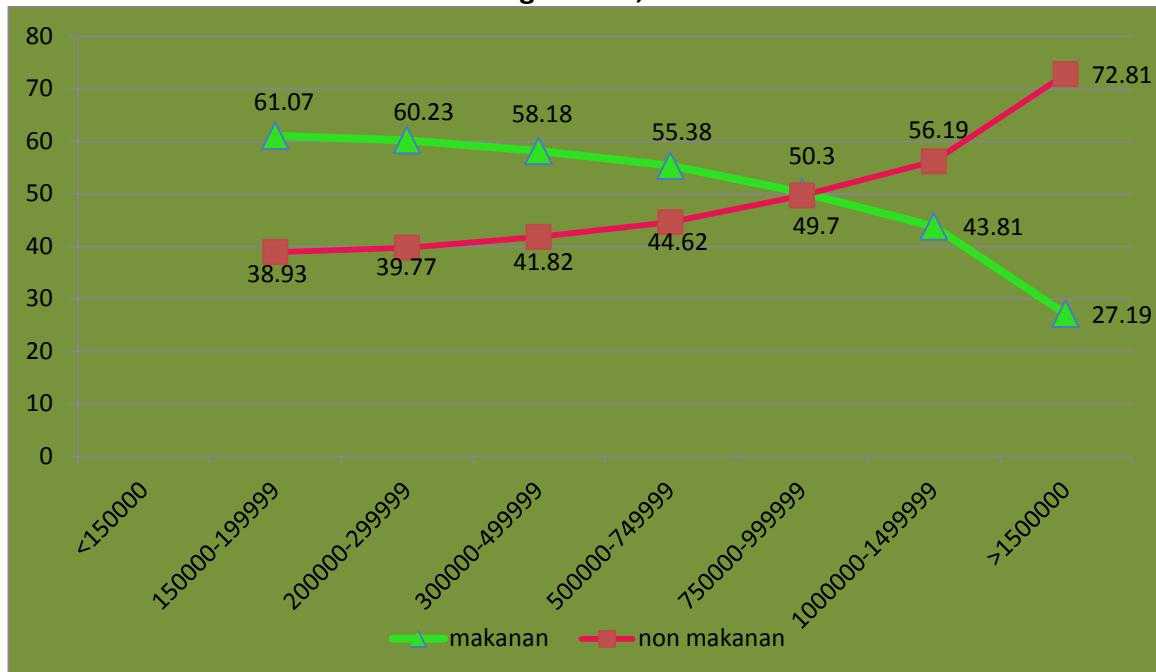
Bila melihat komposisi pola konsumsi masyarakat Kabupaten Magelang Tahun 2010 – 2014 terlihat bahwa pengeluaran konsumsi untuk makanan tahun 2010 ketahun 2015 bergeser dari 54,90 persen menjadi 49,65 persen dan konsumsi non makanan bergeser dari 45,10 persen menjadi 50,35 persen, secara teoritis tidak ada perubahan secara nyata komposisi pola konsumsi atau dapat dikatakan bahwa masyarakat Kabupaten Magelang mulai mengalami perubahan kesejahteraan.

Pada Tahun 2016 pola konsumsi penduduk Kabupaten Magelang masih sama dengan tahun sebelumnya, dimana konsumsi untuk non makanan sedikit lebih tinggi dibanding konsumsi makanan. Konsumsi untuk pengeluaran makanan pada Tahun 2016 sebesar 47,62 persen atau sebesar 294 828 rupiah, dan konsumsi non makanan sebesar 52,38 persen atau sebesar 324 398 rupiah. Pola pengeluaran penduduk cenderung bergeser dari yang sebelumnya sebagian besar untuk pengeluaran makanan menuju ke sebagian besar pengeluaran untuk non makanan. Pola pengeluaran dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisi konsumsi menunjukkan perubahan tingkat kesejahteraan penduduk. Dari angka tersebut dapat lebih menjelaskan bahwa pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran makanan ke pengeluaran non makanan. Porsi pengeluaran masyarakat dengan tingkat pendapatan tinggi terhadap kebutuhan non makanan seperti: perumahan, barang dan jasa, pakaian, dan barang tahan lama (kendaraan, perhiasan dan sebagainya)

biasanya lebih besar dibanding masyarakat dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah.

Gambar 4.3.2

Komposisi Konsumsi Penduduk Kabupaten Magelang berdasarkan KEompok Pengeluaran, 2016



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Tingkat kesejahteraan penduduk yang berbanding lurus dengan pengurangan konsumsi makanan dan bertambahnya konsumsi non makanan bisa dilihat dari komposisi pengeluaran makanan dan non makanan per kelompok pengeluaran. Dilihat dari gambar 4.3.2. diatas, penduduk yang berada pada kelompok pengeluaran di atas Rp. 1 500 000,- konsumsi makanannya rendah sekali, hanya mencapai 27,19 persen sedangkan konsumsi non makannnya mencapai 72,81 persen. Kelompok pengeluaran antara Rp. 1.000.000,- dan Rp. 1.499.999,- mempunyai pengeluaran makanan sebesar 43,81 persen dan non makanan sebesar 56,19 persen. Untuk kelompok pengeluaran Rp. 750.000,- dan Rp. 999.999,- pengeluaran konsumsi makanan dan non makanan hampir seimbang dengan konsumsi makanan sebesar 50,30 persen dan konsumsi non makanan 49,70 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran dibawah itu pengeluaran makanannya masih lebih tinggi dibanding pengeluaran non makanan.

Tabel 4.2.1
Pola Konsumsi Makanan dan Non Makanan Penduduk, Tahun 2016
Jenis Pengeluaran

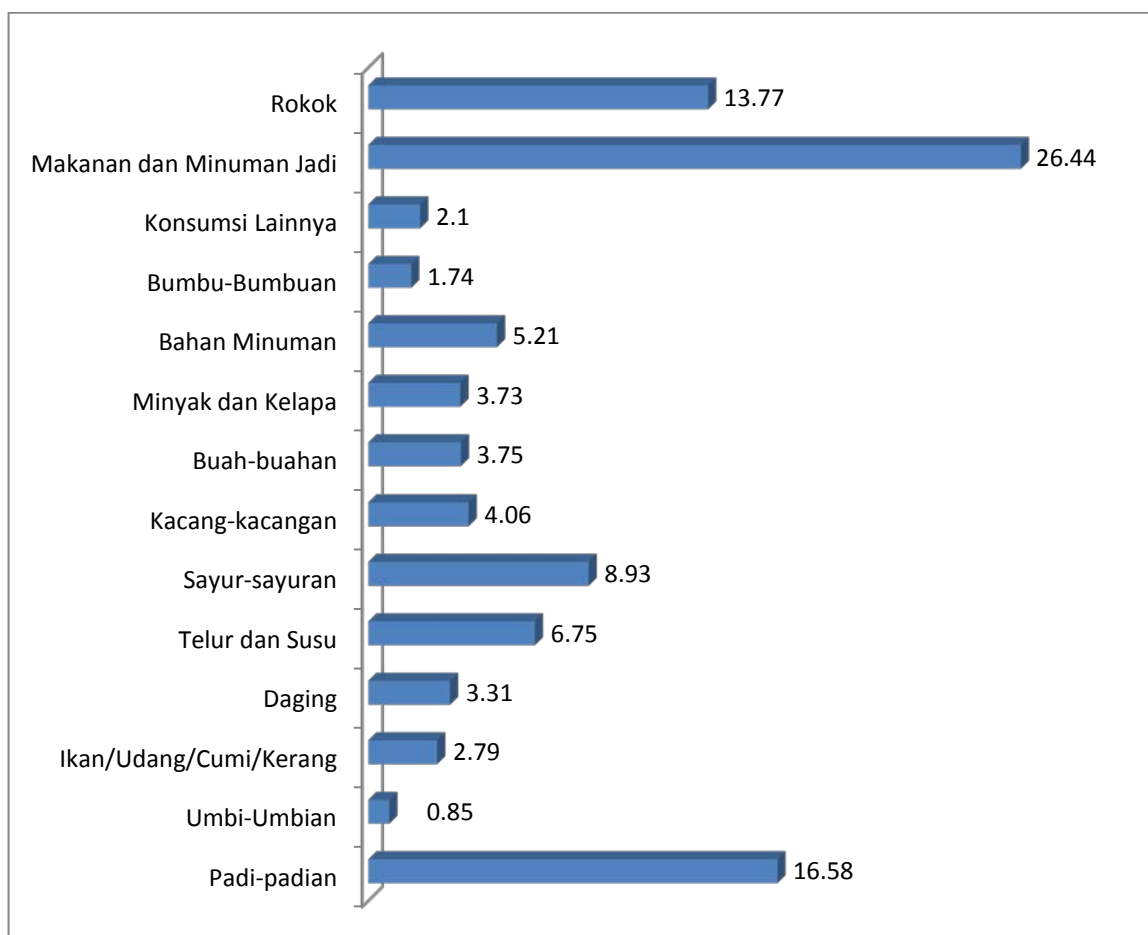
Makanan	%	Non Makanan	%
(1)	(2)	(3)	(4)
Padi-Padian	16,58	Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	44,84
Umbi-Umbian	0,85	Aneka barang dan Jasa	28,70
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	2,79	- Kesehatan	5,50
Daging	3,31	- Pendidikan	8,75
Telur dan Susu	6,75	- Lainnya	14,46
Sayu-Sayuran	8,93	Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	6,18
Kacang-Kacangan	4,06	Barang Tahan Lama	14,42
Buah-Buahan	3,75	Pajak, Pungutan dan Asuransi	4,09
Minyak dan Kelapa	3,73	Keperluan Pesta dan Upacara/Kenduri	1,76
Bahan Minuman	5,21		
Bumbu-Bumbuan	1,74		
Konsumsi Lainnya	2,10		
Makanan dan Minuman Jadi	26,44		
Rokok	13,77		
Jumlah	100,00	Jumlah	100,00
Rata-rata Pengeluaran Tahun 2016 (Rp/Perkapita/bulan)	294 828	Rata-rata Pengeluaran Tahun 2016 (Rp/Perkapita/bulan)	324 298
Tahun 2015	265 706	Tahun 2015	269 404
Tahun 2014	252 337	Tahun 2014	214 341

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Pola Konsumsi Makanan

Pada Tahun 2016 konsumsi makanan penduduk Kabupaten Magelang sebesar Rp. 294.828,- atau 47,62 persen. Dari total pengeluaran makanan, 26,44 persen digunakan untuk konsumsi makanan dan minuman jadi.

Gambar 4.3.3
Pola Konsumsi Makanan Menurut Penggunaan, Tahun 2016



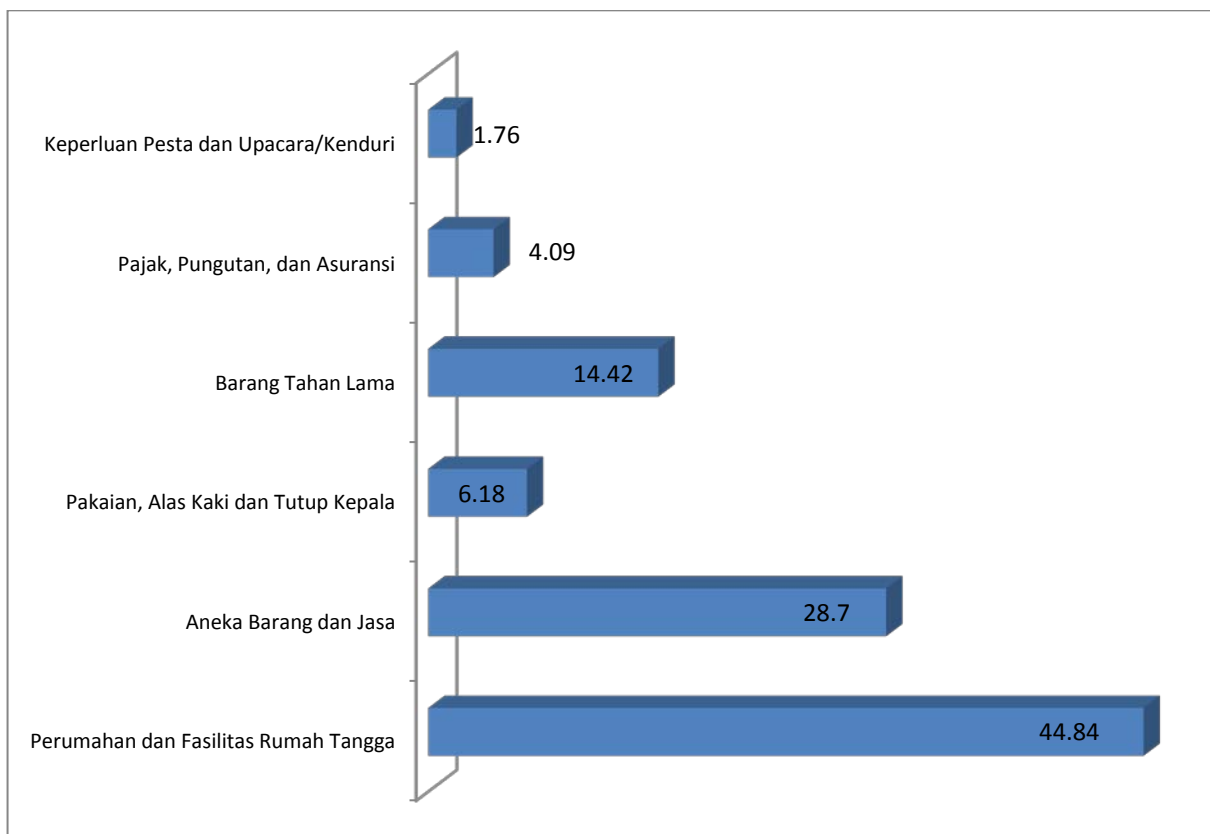
Dari gambar diatas dapat dilihat juga selain konsumsi makanan dan minuman jadi, konsumsi makanan yang persentasenya cukup tinggi adalah konsumsi padi-padian yang sebesar 16,58 persen dan konsumsi rokok yang mencapai 13,77 persen. Sedangkan konsumsi untuk komponen selain tiga komoditas itu mempunyai persentase di bawah 10 persen, dengan konsumsi terendah untuk komoditas umbi-umbian yang hanya 0.85 persen.

Pola Konsumsi Non Makanan

Pengeluaran untuk konsumsi non makanan dipengaruhi oleh besarnya pendapatan penduduk. Semakin tinggi pendapatan penduduk maka pengeluaran untuk konsumsi non makanan semakin tinggi. Hal ini terjadi karena untuk penduduk berpendapatan tinggi kebutuhan sekunder dan bahkan kebutuhan tersiernya sudah bisa terpenuhi.

Pengeluaran untuk konsumsi non makanan penduduk Kabupaten Magelang sebesar Rp. 324.298,- atau sebesar 50,89 persen dari total pengeluaran. Pengeluaran tersebut sebesar 44,84 persen digunakan untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan fasilitas rumah tangga, 28,70 persen untuk memenuhi kebutuhan aneka barang dan jasa termasuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan didalamnya, 14,42 persen untuk memenuhi kebutuhan barang tahan lama, 6,18 persen untuk memenuhi kebutuhan pakaian, alas kaki, dan tutup kepala, 4,09 persen untuk memenuhi kebutuhan pajak, pungutan, dan asuransi, dan 1,76 persen untuk memenuhi keperluan pesta dan upacara/kenduri.

Gambar 4.3.4
Pola Konsumsi Non Makanan Menurut Penggunaan





BAB 5

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan.

Tingkat kemiskinan atau jumlah dan persentase orang yang hidup dibawah garis kemiskinan dan Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan merupakan permasalahan pokok negara berkembang. Sejumlah pakar pembangunan telah menekankan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi namun juga melihat kualitas dari pertumbuhan. Penekanan baru ini menandai bahwa ada banyak hal lain yang penting selain dari angka tingkat pertumbuhan ekonomi.

Publikasi “Kemiskinan dan Pola Konsumsi Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2016” memberi kesimpulan tentang perkembangan tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan penduduk Kabupaten Magelang, yaitu :

1. Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin Tahun 2016 menunjukkan penurunan dibanding tahun sebelumnya.
2. Kualitas penduduk miskin Kabupaten Magelang menunjukkan pengurangan selama periode analisis. Penurunan ini ditandai dengan rata-rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan (Indeks Kedalaman Kemiskinan/ P_1) semakin tinggi. Hal ini menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi garis kemiskinan.
3. Ketimpangan pendapatan atau penyebaran rata-rata pendapatan diantara penduduk miskin semakin lebar ditandai dengan angka indeks keparahan (P_2) lebih tinggi.
4. Pelaksanaan bantuan program penanggulangan kemiskinan masih ada yang belum tepat sasaran. Hal ini ditandai dengan beberapa program bantuan pengentasan kemiskinan yang tidak dinikmati oleh penduduk miskin.
5. Persentase pengeluaran konsumsi untuk pengeluaran makanan di Tahun 2016 semakin mengecil, hal ini menunjukkan secara umum tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Magelang menunjukkan peningkatan.

6. Pengeluaran untuk konsumsi makanan didominasi oleh konsumsi makanan jadi, padi-padian dan rokok/tembakau. Sedangkan pengeluaran untuk konsumsi non makanan didominasi oleh pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga dan pengeluaran untuk kebutuhan aneka barang dan jasa.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MAGELANG

Jl. Soekarno - Hatta No.4 Telp./Fax.(0293) 788143, Kota Mungkid 56511

E-Mail : bps3308@bps.go.id, Homepage <http://magelangkab.bps.go.id/>